
**PENGARUH KESADARAN SERTA SANKSI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR**

**Putri Umala Sari¹, Hastuti Rahmasari², Muhammad Saukhan Aulana³, Cyntia Ardita
Budiono⁴, Khanza Aoera Dievana⁵**

**umalasari putri@gmail.com¹, hastutirahmasari123@gmail.com²,
muhammadsaukhanaulana@gmail.com³, cyntiadita11@gmail.com⁴, kanzadivana75@gmail.com⁵**

Universitas Tidar

Abstrak

Peningkatan jumlah pemilik kendaraan bermotor pada tahun 2019-2021 memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Sanksi pajak kendaraan bermotor dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperbaiki ketertiban perpajakan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun sanksi tersebut juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan memungut pendapatan negara dengan lebih efektif. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kota Magelang tertib dalam membayar kewajiban perpajakan, artinya kesadaran wajib pajak memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembayaran pajak. Semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran dalam hal membayar pajak maka dapat mendorong masyarakat untuk bersedia membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak Kendaraan.

Abstract

The increase in the number of motor vehicle owners in 2019-2021 has had a significant impact on regional income. Motor vehicle tax sanctions can be an effective strategy in improving tax order and increasing local revenue. However, these sanctions can also help increase public awareness and participation in paying taxes and collect state revenues more effectively. Therefore, in this paper, we will analyze the factors that influence public compliance in carrying out motor vehicle tax obligations. The data above shows that the people of Magelang City are orderly in paying tax obligations, which means that awareness of taxpayers has a positive impact on the implementation of tax payments. The more people who have awareness in terms of paying taxes, the more it can encourage people to be willing to pay taxes in accordance with a predetermined deadline.

Keyword: Knowledge Of Taxpayers, Taxpayer Awareness, Vehicle Tax Compliance.

PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, maka pajak dapat mendorong sekaligus mengembangkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Oleh karena itu, pajak merupakan instrumen pemerintah sekaligus sumber pendapatan yang diandalkan negara untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.. Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah menurut (Riftiasari,2019). Pajak juga digunakan sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pemenuhan pembiayaan bagi kepentingan bersama, seperti Pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum guna menunjang kemajuan suatu negara.

Seiring dengan perkembangan waktu berkembang pula lapisan masyarakat, mulai dari kelas menengah atas hingga kelas menengah bawah hampir sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan. Satu dari banyaknya kebutuhan yang wajib dimiliki adalah transportasi.

Ketersediaan transportasi sangatlah penting karena dapat membantu aktivitas masyarakat. Kendaraan bermotor dan bentuk mobilitas lainnya telah berkembang dari sekedar barang mewah menjadi kebutuhan penting dalam operasional masyarakat sehari-hari.

Perkembangan transportasi tersebut juga tentunya dialami oleh masyarakat Kota Magelang yang dapat kita lihat dari jumlah pemilik kendaraan bermotor yang semakin melonjak setiap tahunnya.

Tahun	Jumlah kepemilikan Kendaraan Bermotor	Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah
2019	85.634	24.441.739.925,00
2020	369.753	26.441.596.840,00
2021	653.872	28.845.135.000,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPKAD Kota Magelang, 2023

Dilihat dari data diatas melonjaknya jumlah pemilik kendaraan bermotor pada tahun 2019–2021 sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Data pada tabel 1 tentang penerimaan PKB Kota Magelang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada penghasilan PKB kota Magelang. Maka, pada penulisan ini akan dianalisis terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menjalankan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, untuk membuat penilaian yang metodis, faktual, dan tepat terhadap fakta dan ciri-ciri suatu populasi atau wilayah tertentu, metode survei digunakan dalam evaluasi. Banyak teknik penelitian kuantitatif, seperti survei, digunakan untuk mengumpulkan data mengenai populasi yang cukup besar. Biasanya, bekerja dengan sampel yang lebih kecil. ukuran sampel yang besar diperlukan untuk mengatasi permasalahan nyata berskala besar dengan populasi yang sangat besar melalui penggunaan berbagai teknik penelitian kuantitatif seperti survei. Kuesioner digunakan dalam penelitian survei untuk memperoleh data dari responden. Untuk membuat penilaian yang metodis, faktual, dan tepat terhadap fakta dan ciri-ciri suatu populasi atau wilayah tertentu, metode survei digunakan dalam evaluasi. Banyak teknik penelitian kuantitatif, seperti survei, digunakan untuk mengumpulkan data mengenai populasi yang cukup besar. Biasanya, bekerja dengan sampel yang lebih kecil. ukuran sampel yang besar diperlukan untuk mengatasi permasalahan nyata berskala besar dengan populasi yang sangat besar melalui penggunaan berbagai teknik penelitian kuantitatif seperti survei. Kuesioner digunakan dalam penelitian survei untuk memperoleh data dari responden. Penulis melakukan peninjauan terhadap masyarakat Kota Magelang mengenai tertib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan cara penyebaran angket hingga dari penyebaran angket tersebut memperoleh informasi.

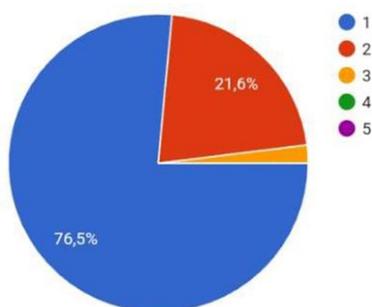
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Tertib Pajak kendaraan Bermotor

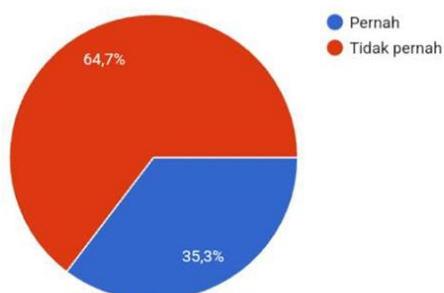
Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang krusial bagi tertib pajak. Kesadaran dalam wajib pajak memiliki arti dimana para subjek sudah mengakui, menghargai, mengetahui, dan menaati ketentuan atau ketentuan dari perpajakan yang masih berlaku dan juga mempunyai keinginan serta kesungguhan guna pemenuhan kewajibannya sebagai subjek pajak. Kesadaran wajib pajak dibutuhkan sebab pajak adalah pemasukan utama bagi suatu negara, yang dimana pajak tersebut dibayar oleh masyarakat dan nantinya juga kembali

kepada masyarakat. Wajib pajak dipahami agar dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman mengenai ketentuan dan kebijakan perpajakan yang masih berlaku, yang tinggi dan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penulis melakukan peninjauan mengenai tertib pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang dengan menggunakan cara penyebaran angket kepada masyarakat, hingga memperoleh hasil sebagai berikut:



Data diatas menunjukkan bahwa lebih dari 50 % masyarakat di Kota Magelang memiliki kesadaran akan membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan dorongan dari diri setiap individu. Kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang baik bagi masyarakat maupun bagi negara.

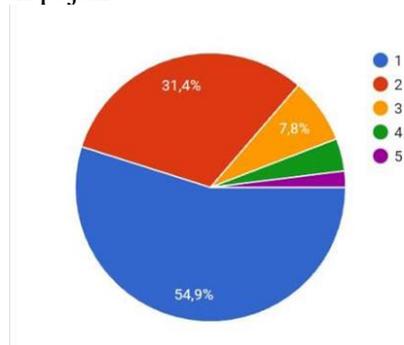


Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kota Magelang tertib dalam melaksanakan wajib pajak kendaraan bermotor, yang berarti kesadaran wajib pajak memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan pembayaran pajak, semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran dalam hal melakukan wajib pajak maka dapat mendorong masyarakat berkenan membayar pajak sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan.

B. Sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap tertib pajak kendaraan bermotor

Sanksi terkait pajak kendaraan bermotor berpengaruh besar terhadap peningkatan kewajiban perpajakan., sanksi pajak kendaraan bermotor berfungsi sebagai kontrol dan pengawasan pemerintah untuk menjamin kepatuhan masyarakat guna menghindari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak karena dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.. Menciptakan rasa takut atau efek jera pada subjek pajak sangat penting untuk menyadarkan masyarakat akan kewajiban perpajakannya meskipun bersifat memaksa. Oleh sebab itu diperlukan peraturan pajak kendaraan bermotor untuk penegakan hukum, yang di dalam peraturan tersebut memuat

mengenai sanksi bagi pelanggar wajib pajak. Peraturan yang mengatur mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, yang dikenal sebagai Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur berbagai aspek perpajakan di Indonesia. Undang-undang tersebut memuat mengenai Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan, sanksi administrasi, penggunaan tahun buku, pembukuan, batas waktu pembayaran pajak dan sanksi keterlambatan pembayaran pajak.



Data diatas yang diperoleh dari survei yang telah dilakukan di Kota Magelang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kota Magelang membayar pajak dengan tertib dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu dengan adanya sanksi yang telah dibuat pemerintah. Sanksi pajak kendaraan memberikan perlindungan perpajakan yang signifikan di Indonesia. Sanksi pajak kendaraan bermotor yang dapat berupa denda, penderekan kendaraan, atau bahkan sanksi pidana, berlaku bagi pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan tepat waktu. Oleh karena itu, sanksi pajak kendaraan bermotor dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak serta menghimpun pendapatan negara dengan lebih efektif.

Sanksi pajak kendaraan sangat penting bagi peningkatan pajak di Indonesia. Sanksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan pembayaran pajak dan pendapatan negara yang lebih efektif. Sanksi pajak kendaraan bermotor dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan ketertiban pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, sanksi pajak kendaraan bermotor juga akan membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan pendapatan negara.

Penegakan sanksi untuk menjamin tertib perpajakan kendaraan bermotor dilakukan oleh otoritas dengan berbagai cara:

1. Penyitaan Kendaraan: Kendaraan yang tidak membayar pajak dapat disita oleh pihak yang berwenang sesuai dengan hukum.
2. Pengawasan dan Pemeriksaan: Pihak yang berwenang dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang belum dibayar untuk mengetahui apakah ada pajak yang terutang yang telah dibayar.
3. Surat Peringatan : Surat peringatan dikirimkan kepada Wajib Pajak yang menunggak sebagai langkah awal penegakan pajak.
4. Penahanan: Dalam kasus yang lebih serius, pihak berwenang dapat menahan wajib pajak yang menunggak sebagai bagian dari penegakan hukum.
5. Penggunaan Teknologi: Pihak berwenang dapat menggunakan teknologi untuk menahan pengendara yang tidak membayar dan melakukan pemantauan serta dapat menjadi lebih efisien.

SIMPULAN

Kesadaran wajib pajak sangat penting untuk melakukan perpajakan yang benar. Kesadaran tersebut mencakup mengakui dan menaati peraturan perpajakan, serta memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini penting karena pajak merupakan sumber pendapatan utama suatu negara. Di Kota Magelang, kajian pajak kendaraan bermotor menemukan bahwa lebih dari 50% masyarakat membayar pajak dengan sukarela. Kesadaran ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Penegakan sanksi juga mempengaruhi ketertiban perpajakan kendaraan bermotor. Sanksi berfungsi sebagai kontrol pemerintah untuk menjamin kepatuhan perpajakan dan memberikan efek jera bagi yang tidak memenuhi kewajibannya.

Peraturan yang mengatur pajak kendaraan bermotor di Indonesia meliputi batas waktu pengembalian pajak, sanksi administrasi, dan denda keterlambatan pembayaran. Data survei Kota Magelang menunjukkan mayoritas masyarakat membayar pajak karena faktor eksternal, seperti sanksi yang diberikan pemerintah. Sanksi tersebut, yang dapat berupa denda, penyitaan kendaraan, dan tuntutan pidana, membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak, sehingga meningkatkan ketertiban perpajakan dan meningkatkan pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Sunaningsih, S. N. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MAGELANG TAHUN 2018-2021. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(2), 241-245
- Nasution, C. S. (2003). Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990–2000. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 7(2), 59-82.
- Nurhayati, N. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Doctoral dissertation, Universitas Islam "45" Bekasi)
- Nurkholidah, A. T., & Fachriyah, N. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Umkm Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Atas Wajib Pajak Pemilik Umkm Pada Kpp Pratama Batu). Universitas Brawijaya. *Jimfeb. ub. ac. id.*
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(1), 142-179.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1-14.
- Wahyudi, A. T. (2019). Pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus terhadap pemilik UMKM yang berada di kabupaten Bangkalan) (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Yasa, I. M., Sukadi, S., & Margi, I. K. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Karakter Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana melalui Pembelajaran Tematik Pada Siswa Kelas VI SD Lab Undiksha. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 1-10.